

KOMPONEN PELESTARI BAHASA DAERAH

Moh. Rosyid¹

ملخص

العنصر الذى يطبق الى تنفيذ اللغة الخصوصية هو المجتمعون الذين يصنعون اللغة الخصوصية (لوكال) على اهميتها. الموضوع التربية الذى يعطى تعليم اللغة الخصوصية منذ تربية الابتدائية الى الجامعة تماما. اللغة الخصوصية هي الوسيلة الاتصالية اليومية واللغة التعليمية. واما دور التربية هو تكميل المادة والوسيلة والطريقة فى تعليم اللغة الخصوصية بامكان المعلمين الجوديين

الكلمات التركيزية : اللغة التعليمية

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki tidak kurang dari 500 suku bangsa dan 700 bahasa daerah. Keragaman itu diabadikan dalam Lambang Negara yang diwujudkan dengan cengkeraman Burung Garuda. Tulisan yang dicengkeram itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sejarahnya, pencantuman kata Bhinneka Tunggal Ika tertuang dalam puisi Jawa klasik (Kakawin) Sutasoma pada pupuh 139 bait kelima. Bunyinya "Rwaneka dhatu winuwus wara Buddha Wisma/ bhineki rakwa ring apan kena parwanosen/mangkang jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal/bhinneka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa". Bait yang mencantumkan Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan Dwi Woro Retno Mastuti (Dosen Studi Jawa FIB UI) dengan Hasto Bramantyo (dosen STAB Syailendra, Kopeng,

¹ Penulis adalah Dosen STAIN Kudus

Salatiga): Konon dikatakan bahwa wujud Buddha dan Siwa itu berbeda/ Mereka memang berbeda, namun bagaimana kita bisa mengenal perbedaannya dalam selintas pandang/karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua/ Mereka memang berbeda-beda, namun pada hakikatnya sama karena tidak ada kebenaran yang mendua. Siapa Sutasoma? putra mahkota Raja Hastina Sri Mahaketu, ia menolak dinobatkan menjadi raja. "Saya (Sutasoma) tidak mempunyai keinginan apa pun selain pergi ke tempat sunyi di hutan untuk melakukan disiplin spiritual (pupuh 4 bait 13). Pangeran Sutasoma muda (sebagai titisan Buddha) akhirnya pergi dari kerajaan tanpa sepengetahuan siapa pun. Perjalanan Sutasoma dikenal 'jalan kebenaran Buddha' dengan prinsip hidup buddhis: mendapati musuh tak untuk dihancurkan, tapi dirangkul dan dijadikan teman. Musuh dinasehati agar meninggalkan kejahatan dan menjadi orang baik dan berguna. Pihak yang memusuhi Sutasoma adalah Gajawaktra, Nagaraja, dan macan betina. Sang macan karena kelaparan, ia akan memangsa anaknya, tetapi dilarang oleh Sutasoma agar sang macan memangsa Sutasoma. Tatkala taring macan betina menancap di dada Sutasoma, darahnya mengucur menjadi amerta (air kehidupan) yang memuaskan macan betina, meski sang macan menyesal karena membunuh Sutasoma. Ia menghendaki menebus rasa bersalah agar dibunuh, ia juga berniat bunuh diri. Raja Dewa Indra mengetahui rencana bunuh diri macan betina, sang raja menghidupkan Sutasoma. Mohammad Yamin (1903-1962) mencuplik kata Bhinneka Tunggal Ika sebagai seloka Tantular dan dicantumkan dalam lambang negara Garuda Pancasila buatan Sultan Abdul Hamid Pontianak. Lambang negara itu kemudian disahkan Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 11 Februari 1950.

Dari aspek teritorial, luasnya wilayah geografis negeri ini juga memiliki berbagai budaya dan beragam genetika dengan jumlah sekitar 500 etnis. Etnis tersebut dipilah dalam tiga kelompok populasi (pohon filogenetik). Kelompok pertama merupakan manusia Batak, Jawa, Tengger, Bali, Dayak, Minang, dan Melayu (Riau). Kedua, Sasak, Makassar, Bugis, Sumba Timur, Kaili, Minahasa, dan Sumbawa. Masyarakat suku Toraja di Tana Toraja dan Toraja Utara Sulawesi Selatan

diduga kuat merupakan satu rumpun dengan masyarakat di daerah Nias dan Batak. Ketiganya sama-sama penutur Austronesia dengan kesamaan filosofi budaya. Suku Austronesia bermigrasi ke Nusantara pada 4.000 tahun lalu. Ketiga, manusia Alor dan Papua. Kelompok ketiga ini berbeda dengan kelompok pertama dan kedua karena nenek moyang kelompok ketiga yakni Aborigin Australia. Papua lebih dulu menempati kepulauan Indonesia yakni 50.000-60.000 tahun lalu, disusul kedatangan para migran penutur Austronesia pada 5.000-2.000 tahun lalu. Kedekatan secara teritorial antara Indonesia (Papua) dengan Papua Niugini, sehingga tatkala Era Orde Baru, warga Papua korban politik karena berbeda ideologi masih ketakutan kembali ke Indonesia karena trauma menjadi korban pelanggaran HAM. Data Konsul Indonesia untuk Vanimo, Papua Niugini terdapat 12.000 warga Papua mengungsi di Papua Niugini sejak 1984 hingga kini. Mereka berasal dari Jayapura, Biak Numfor, Merauke, dan Kepulauan Yapen yang tersebar di Vanimo, Port Moresby, Lae, dan Wewak. Pengungsi tersebut meresahkan warga Papua Niugini karena mengambil alih tanah untuk lahan pertanian. Kondisinya memprihatinkan karena anak-anak tidak sekolah, akibat hidupnya berpindah-pindah dan tak berkewarganegaraan hingga kini. Meskipun demikian, mereka belum mau kembali ke Indonesia karena terpengaruh informasi negatif tentang Indonesia (*Kompas*, 7 November 2014).

Etnik tersebut memiliki ragam bahasa yang tersebar diberbagai pulau masing-masing memiliki keunikan sebagai wujud dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang utuh. Potensi tersebut perlu *diuri-uri* supaya eksis agar prinsip *the fittest would survive* (individu inferior akan mati dan individu superior akan bertahan) tidak menerpa khazanah budaya kita. Langkah riil yang kita lakukan adalah menghidupkan keanekaragaman etnis, budaya, dan khazanah lokal. Jika tidak, yang terjadi adalah konflik. Hal ini berpijak pada kata bijak bahwa hidup adalah suatu perjalanan, di jalan yang panjang yang kita sebut kehidupan, terkadang kita kehilangan arah hidup. Apapun keputusannya di hari ini, dapat membawa perbedaan di masa depan. Hanya dengan satu tekad menuju perbaikan setapak, tergapailah

kemajuan hidup kini dan nanti.

Akan tetapi, keragaman tersebut khususnya bahasa Jawa, oleh para linguis (ahli bahasa) Jawa, prihatin karena semakin menurunnya pemahaman dan sudah tidak familiernya bahasa Jawa bagi anak muda suku Jawa yang dilatarbelakangi berbagai hal. Sejak Kongres Bahasa Jawa VI tahun 2007 yang menelan dana Rp 5 milyar merekomendasikan Perda bahasa Jawa tapi realisasi kecintaan terhadap Bahasa Jawa belum optimal. Hal ini diwujudkan dengan makin asingnya bahasa Jawa sebagai media komunikasi generasi muda. Sehingga banyak yang mengusulkan perlunya mewujudkan perda bahasa Jawa (Tengah) sebagai payung hukum, agar bahasa Jawa lestari. Di sisi lain, pembelajaran bahasa Jawa telah menjadi mata ajar wajib di jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan keputusan Gubernur Jateng (saat itu Mardiyanto) Nomor 895.5/01/2005 tanggal 23 Februari 2005 perlu diperkokoh dengan Perda bupati. Berlangsungnya proses pembelajaran belum optimal dengan indikator lembaga pendidikan dan dinas pendidikan masih enggan karena permasalahan kurikulum, buku ajar, siswa, dan pendidik karena materinya dianggap sulit. Sebagai contoh, pekerjaan rumah siswa (PR) bahasa Jawa dikerjakan orangtua atau kakeknya, dan guru pengajar bukan ahli di bidang bahasa Jawa (tidak *link and match*).

Ide Perda Bahasa Jawa pada dasarnya mengkilat adanya Perda bahasa Bali (tahun 2002) dan Perda bahasa Sunda (tahun 2003). Tetapi, Perda bahasa Jawa menuai kritik bahwa eksisnya bahasa Jawa tidak sertamerta dengan Perda. Sebagai bukti bahwa menghidupkan aksara Jawa lebih praktis, didukung kondisi bahasa Jawa Tengah heterogen, seperti dialek 'standar', dialek Banyumas dan Tegal. Berbeda dengan Bali dan Sunda yang bahasa daerahnya homogen, sehingga perda bahasa Jawa berbasiskan kabupaten/kota, bukan provinsi. Hal tersebut mengkilat fungsi bahasa daerah -termasuk bahasa Jawa- yang dirumuskan dalam seminar bahasa nasional pada tanggal 25 s.d 28 Februari 1975 sebagai lambang kebanggaan daerah, identitas daerah, alat perhubungan masyarakat daerah, pendukung bahasa nasional, bahasa pengantar di sekolah, dan alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah.

Perlunya mencari pembandingan bahwa pada pra-kongres

Peradaban Aceh 2015 Sabtu 26 September 2015 di Aceh yang di antaranya membahas penguatan bahasa-bahasa lokal Aceh. Menurut Ketua Kongres Peradaban Aceh Ahmad Farhan Hamid, ada 13 bahasa lokal di Aceh, yakni bahasa Aceh pesisir, Gayo, Tamiang, Alas, Aneuk Jamee, Singkil, Sigulai, Devayan, Kluet, Haloban, Pakpak, Nias, dan Lekon yang pemakaiannya terbatas pada orang lokal di daerah Aceh. Orang lokal pengguna bahasa tersebut mulai berkurang sehingga bahasa lokal tersebut tersisih akibat pemakaian bahasa Aceh pesisir lebih dominan sebagai bahasa sehari-hari. Hal ini dipengaruhi oleh faktir pemimpin di daerah dan di provinsi mayoritas berasal dari Aceh pesisir. Penyebab lainnya, bahasa lokal Aceh belum menjadi pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan di Aceh. Di sisi lain, 75 bahasa lokal Aceh hampir punah dan 268 terancam punah (*Kompas*, 27 September 2015).

B. Landasan Teori

1. Sejarah Bahasa Lisan ke Tulis

Keberadaan bahasa sejak adanya manusia karena bahasa sebagai media interaksi/komunikasi antarsesama. Akan tetapi, bahasa saat itu dikenal bahasa lisan. Dalam perkembangannya, manusia berinteraksi dengan sesamanya mengalami dinamika, maksudnya tidak hanya menggunakan bahasa lisan tetapi bertambah dengan bahasa tulis. Dalam catatan sejarah, sejak 4100-3800 SM manusia menggunakan simbol kemudian berkembang dalam bentuk gambar sederhana. Selanjutnya berkembang menjadi gambar yang terartikulasikan sesuai hal yang ingin dikomunikasikan. Akan tetapi, bentuk ini belum mampu memenuhi aspek pesan komunikasi karena luasnya hal yang dikomunikasikan sehingga muncul bentuk rumus (*pictographic writing*) yakni pengucapan abstrak dengan menggabungkan gambar yang masih sederhana. Berikutnya dalam bentuk potongan meski masih berbentuk gambar dalam satu suku kata. Tahap berikutnya berupa bunyi (abstraksi) yakni penggunaan suku kata dalam (menuju) bentuk kalimat. Fase selanjutnya berupa alfabet untuk membedakan tanda bunyi suku kata yang

melahirkan tanda vokal dan akhirnya dikembangkan menjadi bahasa tulis. Digunakannya bahasa tulis sejak kehidupan manusia beralih dari pola hidup berpindah-pindah (*nomaden*) menjadi menetap. Awal mula bahasa tulis dalam kajian *piktograf* diawali bentuk gambar sederhana (proto-menulis), sistem *ideograf* berkembang menjadi gabungan gambar untuk menunjukkan konsep tertentu. Bangsa Romawi belajar menulis diawali abad ke-5 SM dari peradaban Etruscan yang menggunakan salah satu dari aksara Italia (*Italic Script*) yang berasal dari Yunani Barat. Akibat dominasi budaya Romawi, aksara Italia tak banyak yang bertahan dan bahasa Etruscan sebagian besar hilang.

Abjad Yunani diawali meminjam abjad Fenisia dan diadaptasi menjadi bahasanya sendiri. Pada 400 SM Yunani memperkenalkan sistem huruf menggantikan piktograf. Pada 114 SM Romawi menyempurnakannya dan menjadi embrio (cikal bakal) alfabet saat ini. Pada abad ke-8 SM tradisi menulis kian mapan. Pertama kali menulis dari arah kiri ke kanan penulis. Adapun di China sistem tulis-menulis diperkirakan mulai berkembang sekitar abad ke-1200 SM era Dinasti Syang sekitar 1500-1050 SM di Anyang. Tradisi menulis di kertas dikembangkan oleh bangsa China. Inskripsinya terungkap di Honan, sebuah daerah tua di bagian utara Sungai Kuning (Hoang ho). Adapun peradaban Islam mengadopsinya dengan mendirikan pabrik kertas pertama pada abad pertengahan. Geneologi tulisan Arab adalah alfabet Sinai yang berkembang di Jazirah Arab bagian utara dikenal tulisan Tadmury dan Nabatean (Nabthy) dari rumpun tulisan Aramia, selain itu ada pula di selatan serta Asia Kecil. Alfabet Sinai digunakan pertama kali oleh bangsa Semit di kawasan Arab prasejarah. Bangsa Nabatean merupakan imigran dari Transyordania yang menempati wilayah Edomite Petra hingga mendirikan Kerajaan Anbath. Semasa Haritsats (9-40 M) kekuasaannya hampir seluruh wilayah jazirah Arab yang meninggalkan budaya dan bekas peradaaan di Kota Petra. Peradaban ini melahirkan tulisan Arab yang semula digunakan interkasi lisan, adapun interaksi tulis menggunakan tulisan Nabatean. Pada aad pertama masehi peradaban Nabatean kian berkembang dan pada abad ke-7 tulisan Arab dikenal dunia.

Prancis dan Italia mempelajari teknik menulis kertas pada 1200 SM, sedangkan China memulainya pada 770 M. Di Mesir tradisi menulis sekitar 3000 SM dalam bentuk tanda-tanda kecil (*hieroglif*) kemudian menjadi tulisan tangan yang mudah dipahami (*hieratic*) sejak 2613-2160 SM hingga 700 SM. *Hieratic* digantikan *demotic* pada 661-332 SM, selanjutnya muncul *coptic* pada abad pertama masehi. Masyarakat lembah Mesopotamia menggunakan tulisan gambar pada era Babylonia dan diteruskan oleh Bangsa Assyria. Kitab UU Hammurabi menjadi bukti autentiknya tulisan piktograf yang dikenal tulisan paku. Warga yang berdomisili di Lembah Sungai Nil dikenal tulisan berbentuk greek, demotik, dan hieroglif.

Menurut arkeolog prasejarah Pusat Arkeologi Nasional (Arkenas) Harry Truman Simanjuntak di Jakarta, Jumat 8 Agustus 2014 bahwa wilayah sebaran bahasa Austronesia sangat luas, mulai dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur dan dari Selandia Baru di selatan hingga Taiwan dan Mikronesia di utara. Peta sebaran terdeteksi dari kemiripan bahasa di beberapa daerah seperti ditemukan Cornelis de Houtman tahun 1596 antara bahasa Malagasy (Madagaskar) dan Melayu, juga antara bahasa Melayu dan Oseania yang dicatat H Reland tahun 1708. Kapten J Cook saat berlayar di Pasifik Barat pada 1776-1780 yang mencatat kemiripan bahasa, budaya, dan wajah orang Polinesia di Selandia Baru, Tahiti, dan Pulau Paskah. Di Indonesia kajian perihal bahasa Austronesia terabaikan dan baru mulai dibicarakan awal tahun 2000-an. Selama ini, orang lebih banyak mempelajari budaya neolitik penutur Austronesia dan tidak pernah mempertanyakan siapa dan bagaimana sebarannya. Topik Austronesia baru mulai mencuat dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia VIII, 9-11 September 2003 di Jakarta. Di Indonesia masih minim data dan penelitiannya pun banyak dari orang asing. Austronesia merupakan kajian bidang arkeologi prasejarah. Kajian tentang rumpun bahasa Austronesia mulai dibahas lebih dari dua abad lalu. Namun, studi tentang penutur Austronesia di Indonesia masih terabaikan. Padahal, 80 persen penutur Austronesia berada di kepulauan di Indonesia yang terdiri 1.200-an bahasa digunakan sekitar 300 juta orang (*Kompas*, 9 Agustus 2014).

2. Sumpah Pemuda

Peristiwa bersejarah yang memompa nasionalisme di era kolonial di antaranya adalah Sumpah Pemuda. Sebelum terjadinya Sumpah Pemuda, terdapat kejadian penting untuk dipahami. Pada 30 April 1926 Kongres Kerapatan Pemuda Indonesia I di Jakarta untuk menggaungkan tujuan persatuan yang dihadiri wakil dari organisasi pemuda, yakni Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks Bond yang pemimpin Kongresnya Mohammad Tabrani. Pada 15 Agustus 1926 pertemuan kedua di Jakarta beberapa organisasi pemuda dan Komite Kongres Pemuda I. Isi pertemuan menghidupkan rasa persatuan dan meluaskan kerja sama untuk memperkuat persatuan bercorak Indonesia. Pada 20 Februari 1927 pertemuan ketiga semakin mengokohkan hasrat para pemuda untuk persatuan. Pada 23 April 1927 pertemuan keempat merumuskan keputusan bahwa Indonesia merdeka sebagai tujuan dan perserikatan pemuda menuju persatuan. Pada 23 September 1927 terjadi penangkapan sejumlah tokoh pemuda oleh Belanda, yakni Moh Hatta, RM Abdul Madjid Djajadiningrat, Nazir Dt Oamuntjak, dan Ali Sastroamidjojo. Pada 16 Desember 1927 Belanda menangkap dan mengasingkan Dr Tjipto Mangunkusumo ke Banda dengan tuduhan menghasut rakyat Indonesia untuk memberontak. Hal ini semakin memperkuat hasrat persatuan para pemuda. Pada 17 Desember 1927 berdiri Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Anggotanya adalah beberapa organisasi atau parpol yakni PNI, Algemene Studiesclub, Partai Sarikat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Sarekat Sumatra, Kaum Betawi, Indonesische Studieclub, Sarekat Madura, Tirta Yasa, dan Perserikatan Celebes. Pada 30 Agustus s.d 2 September 1928 Kongres I Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI) yang menghasilkan seluruh pergerakan rakyat harus bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Pada April 1928 Kongres ke-20 Budi Utomo menghasilkan pengakuan cita-cita persatuan nasional Indonesia bertujuan awal untuk mempersatukan rakyat dan budaya Jawa, Madura, Bali, Lombok, dan sekitarnya, bertransformasi menjadi cita-cita Indonesia merdeka. Pada 27 Oktober 1928 Sidang I digelar di gedung Katholieke

Jingelingen Bond, Lapangan Banteng Jakarta dengan Ketua Soegondo Djojopoespito. Mohammad Yamin saat itu berpidato dengan judul Persatuan dan Kebangsaan Indonesia. Pada 28 Oktober 1928 Sidang II diadakan dari pagi hingga siang di gedung Oost Java Bioscoop, Medan Merdeka Utara Jakarta. Adapun dari sore hingga malam di gedung Indonesische clubgebouw Kramat 106 Jakarta diselenggarakan Sidang III. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan untuk pertama kali dan dimainkan oleh WR Soepratman. Menghasilkan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II menghasilkan naskah Sumpah Pemuda Pertama, Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dianalisis oleh Litbang Kompas yang disarikan dari buku *Peranan Gedung Kramat Raya 106 dalam Melahirkan Sumpah Pemuda*, Depdikbud 1998, *Sedjarah Perdjuaan Pemuda Indonesia*, Balai Pustaka, 1963, dan *Risalah Gerakan Pemuda*, Pustaka Antara, 1952 (*Kompas*, 28 Oktober 2014).

Sumpah Pemuda dimaknai sebagai deklarasi atas kesatuan bangsa, Tanah Air, dan bahasa yang disusun dalam sebuah kongres organisasi kepemudaan nasional di Jakarta akhir Oktober 1928. Juga sebagai kristalisasi semangat mewujudkan satu bangsa dengan Tanah Air satu dan berbicara dengan bahasa yang satu, yakni Bahasa Indonesia yang dibidani pemuda dengan landasan nasionalisme, ideologi tertentu, dan kedaerahan. Organisasi yang membidani Sumpah Pemuda, yakni organisasi bersifat kedaerahan (1) Jong Java; nama ini menggantikan Tri Koro Dharmo pada Kongres ke-1 di Solo 1918. Hingga kongres ke-5, Jong Java bertujuan membangunkan cita-cita Jawa Raya. Pada Kongres ke-6 tahun 1926, masuklah pengaruh dari Syarikat Islam, tujuan organisasi pun bertransformasi untuk memajukan persatuan dengan semua golongan bangsa di Hindia Belanda. Para tokohnya yakni Dr Satiman Wirjosandjojo, Wongsonegoro, dan Sutomo, (2) Jong Sumatranen Bond; yang dideklarasikan di gedung Stovia Jakarta pada 2 Desember 1917 oleh pemuda asal Sumatera. Tujuan organisasi memperkokoh ikatan di antara pelajar asal Sumatera dan menanamkan kesadaran sebagai

pemimpin. Tokohnya yakni Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, M.Tamsil, Bahder Djohan Assat, Abu Hanifah, dan AK Gani., (3) Jong Ambon yang ditokohi J Leimena berupaya mempererat rasa persatuan sesama pemuda asal Maluku dan memajukan kebudayaannya sejak 1918, (4) Sekar Rukun yakni organisasi kelompok pemuda berasal dari Sunda, (5) Jong Celebes dipimpin Arnold Mononutu, Waroruntu, dan Magdalena Mokkaoginta berusaha mengikat rasa persatuan melalui penerbitan majalah bertajuk "Suara Celebes", (6) Pemuda Kaum Betawi merupakan kelompok pemuda berasal dari Jakarta asli dengan tokohnya Husni Thamrin dan Rohjani, (7) Jong Bataks Bond yang berusaha memperkuat tali persatuan di antara kaum muda Sumut dengan tokohnya Amir Sjarifuddin, (8) Jong Minahasa didirikan tahun 1918 yang beranggotakan pemuda asal Minahasa untuk mempererat rasa persatuan di antara mereka ditokohi GR Poantouw, (9) Jong Timoreesch Verbond yakni organisasi pemuda dari Timor dengan tokohnya JW Amalo.

Adapun organisasi berbasis Study Club (1) Indonesisch Studieclub didirikan sejak 11 Juni 1924 di Surabaya. Tujuannya membangunkan kaum terpelajar agar memiliki kewajiban pada masyarakat dan memperdalam pengetahuan sosial politik Hindia Belanda. Salah satu tokohnya adalah Dr Soetomo, (2) Algemene Studieclub berada di Bandung berupaya membangun kesadaran kaum muda terhadap persoalan bangsa, tetapi dengan asas perjuangan non-kooperatif. Tokohnya antara lain Soekarnodan Anwari. Kelak kelompok ini menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Organisasi berbasis nasionalisme dan agama, yakni (1) Perhimpunan Indonesia yang berdiri pada 1908 di Belanda dengan nama Indische Vereeniging, perkumpulan ini mendukung asas demokrasi, politik non-kooperatif mencita-citakan nasionalisme Indonesia. Para tokohnya, yakni Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, Gatot Tanumihardja, Nasir Dt Pamuntjak, dan Iwa Kusuma Sumantri, (2) Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) didirikan 1925 yang beranggotakan mahasiswa sekolah tinggi di Jakarta dan Bandung, seperti Rechtshoge School, Medische Hogeschool, Technische Hogeschool. Dengan tokohnya Sugondo Djojospito, Abdul Sjukur, Gularso,

Hendromartono, Rohjani, S Djoened Poesponegoro, Kuntjoro, Wilopo, Moh Yamin, AK Gani, dan Abu Hanifah, (3) Pemuda Indonesia yang semula bernama Jong Indonesia, berdiri di Bandung pada 20 Februari 1927. Pada Kongres I Desember 1927 para pemuda memutuskan dengan nama Pemuda Indonesia dan bahasa Indonesia-Melayu sebagai bahasa bersama. Tokohnya yakni Sugiono, Sunardi Moeljadi, Soepangkat, Agoes Prawiranata, Soekamso, Soelasmi, Katjasungkono, dan Abdulgani, (4) Jong Islamieten Bond berdiri pada Januari 1926 sebagai wadah memajukan Islam dan memahami situasi politik. Para tokohnya yakni hadji Agus Salim, Mohammad Roem, Hasim Sadewo, M.Djuwari, dan Kasman Singodimedjo.

Pada tanggal 28 Oktober 1928 pemuda-pelajar Hindia Belanda (Indonesia) berkongres yang kedua kali atas prakarsa Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Forum itu dihadiri utusan Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Islamieten Bond, Jong Minahasa, Pemuda Pasundan, Persatuan Pemuda Betawi, dsb. yang mengikrarkan sumpah pemuda. Ikrar itu hasil rumusan Moh. Yamin berupa bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Munculnya ikrar tersebut sebelumnya telah diberi fondasi oleh pergerakan Boedi Oetomo tahun 1908. Muncul keprihatinan, mengapa gema Sumpah Pemuda kian memudar? Ritme nyanyian 'Indonesia Raya' juga kian fals?, nyanyian/lagu tersebut diperdengarkan setelah pembacaan deklarasi Sumpah Pemuda. Sumpah pemuda oleh para sejarawan merupakan pergeseran pola perlawanan terhadap kolonial sejak abad ke-17 hingga 19 yang semula dengan pergerakan fisik diubah dengan organisasi, ideologi, media massa, dialog atau diplomasi. Perjuangan dengan otak telah dimulai sejak Wahidin dan sejumlah mahasiswa STOVIA membentuk pergerakan Boedi Oetomo, 20 Mei 1908. Perang fisik seperti Perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa, Perang Goa di Sulawesi Selatan, Perang Pattimura di Maluku, Perang Banjar di Kalimantan, Perang Sisingamangaraja di Batak, Perang Padri di Minangkabau, dsb.

3. Urgensi Perlindungan Bahasa

Keberadaan bahasa nasional dan daerah sangat penting untuk dilindungi dan dikembangkan sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Hal ini sebagai bukti bahwa bahasa mendapat perhatian ekstra oleh negara. Hal yang menjadi bahan pertimbangan dengan disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2009 bahwa bahasa merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalih lainnya, bahasa merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pada Pasal 1 (2) Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 1 (6) Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 (7) Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pasal 2 Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan

berdasarkan asas persatuan; kedaulatan; kehormatan; kebangsaan; kebhinnekatunggalikaan; ketertiban; kepastian hukum; keseimbangan; keserasian; dan keselarasan. Pasal 3 Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bertujuan untuk (a) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (c) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Pasal 25 (1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. (2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. (3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Pasal 26 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 27 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Pasal 28 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Pasal 29 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. (2) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. (3) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing. Pasal 30 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Pasal 31 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia. (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Pasal 32 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam

forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. (2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Pasal 33 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. (2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia. Pasal 34 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan. Pasal 35 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. (2) Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Pasal 36 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi. (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. Pasal 37 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan. Pasal 38 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing. Pasal 39 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. (2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan

bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus. Pasal 40 ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 41 (1) Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 42 (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 43 (1) Pemerintah dapat memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 44 (1) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. (2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 45 Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat

(2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

4. Jenis Penggunaan Bahasa

Jenis penggunaan bahasa meliputi (i) bahasa nasional adalah dialek regional yang menjadi standar atau *lingua franca*, diakui sebagai bahasa persatuan karena perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa, atau ketetapan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 (2) bahasa NKRI adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Pasal 2 pengaturan bahasa sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan NKRI, (ii) bahasa persatuan adalah bahasa yang dianggap sebagai faktor menyatukan masyarakat secara politis dan kultural, (iii) bahasa purba adalah bahasa hipotesis (dugaan) yang dianggap menurunkan beberapa bahasa yang nyata-nyata ada. Misalnya, bahasa Proto-Austronesia adalah bahasa purba dari bahasa pribumi di Taiwan, Indonesia, Madagaskar sampai Lautan Pasifik, (iv) bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan komunikasi resmi, seperti perundang-undangan dan surat dinas, (v) bahasa siul adalah pola bahasa yang hubungan sintaksisnya diungkapkan dengan siul. Cara komunikasi tersebut terdapat pada bangsa Indian Mazatek di Meksiko, (vi) bahasa standar adalah ragam bahasa yang dipakai dalam situasi resmi dan dianggap paling baik, seperti dalam perundang-undangan dan berbicara di depan umum atau dengan orang yang dihormati, dan bahasa persatuan dalam masyarakat yang mempunyai banyak bahasa, (vii) bahasa umum adalah (1) bagian dari khazanah leksikal, gramatikal, dan stilistik. Stilistika adalah tata bahasa meliputi kebiasaan atau ungkapan pemakaian bahasa yang mempunyai efek kepada pembacanya (menyelidiki pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan gaya bahasa) (KBBI, 2008:461). Suatu bahasa yang dimengerti dan diterima sebagai pemakaian yang baik oleh semua orang yang mengenal bahasa itu. Tidak termasuk di dalamnya: ragam kesusastraan dan ragam teknis yang hanya dimengerti oleh orang yang mendapat latihan khusus, ragam substandar dan ragam yang tidak

diterima untuk komunikasi serius, dan unsur khusus dari dialek regional atau sosial, (2) ragam bahasa yang dipakai oleh sebagian besar pemakai bahasa dalam situasi sehari-hari, (viii) bahasa modern adalah dialek temporal yang dipergunakan pada saat ini, untuk membedakannya dengan bahasa kuno atau bahasa klasik, (ix) bahasa kedua adalah bahasa yang dikuasai seseorang sesudah bahasa ibu dan tidak ada keharusan mempelajarinya dalam masyarakat bahasa. Bahasa kedua sebagai bahasa resmi, (x) bahasa asing adalah bahasa yang dikuasai oleh pemakainya melalui pendidikan formal, (xi) bahasa bangsawan adalah ragam bahasa Melayu yang dipakai bangsawan di istana, (xii) bahasa daerah adalah bahasa yang dipergunakan penduduk asli suatu daerah, (xiii) bahasa dalam adalah ragam bahasa Melayu yang dipakai untuk menyapa raja atau keluarganya, (xiv) bahasa hidup adalah bahasa yang masih dipakai oleh masyarakat bahasa, (xv) bahasa ibu (bahasa pertama) adalah bahasa yang dikuasai oleh seseorang sejak awal hidupnya melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, (xvi) bahasa imigran adalah bahasa ibu suatu kelompok minoritas pendatang dalam suatu masyarakat bahasa. Seperti, bahasa Hokkian di Indonesia, (xvii) bahasa induk adalah satu dari kelompok bahasa berkerabat yang menurunkan bahasa lain. Misalnya, bahasa Latin yang dianggap menurunkan bahasa Romantika, seperti bahasa Perancis, Italia, dan Rumania, (xviii) bahasa jawi adalah nama kuno untuk bahasa Melayu, khususnya yang ditulis dengan huruf Arab (*pegon*), (xix) bahasa klasik adalah dialek temporal suatu bahasa yang dianggap mewakili jumlah perkembangan kebudayaan pemakainya dan mempunyai kesusastraan yang penting. Contoh: bahasa Latin Klasik, bahasa Melayu Klasik, dan bahasa Arab, (xx) basa *kedhaton* adalah ragam bahasa Jawa yang khusus dipakai di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Kadang-kadang bahasa itu digunakan dalam pedalangan, dan (xxi) basa *bagongan* adalah jenis basa *kedhaton* yang masih dipakai di Keraton Yogyakarta. Bahasa ini mempunyai ciri gramatikal agak khusus dan mempunyai 11 kata khusus yaitu *enggeh*: ya, *punapi*: apa, *puniki*: ini, *puniku*: itu, *seos*: beda, *wenten*: ada, dsb. (ENI, 2004: 52), meskipun eksistensi bahasa tersebut tidak semuanya eksis hingga kini. Dengan berbahasa yang baik dan benar,

diharapkan tercipta pola berpikir yang deduktif (proses berpikir dengan menyimpulkan hal atau sifat yang khusus dari gejala umum), divergen (berpikir dengan cara membuat pemecahan masalah atau relevansi ketepatan jawaban), induktif (proses berpikir dengan menyimpulkan berbagai macam hal atau gejala yang khusus menjadi sesuatu aturan atau hukum yang umum), konvergen (memberi jawaban paling tepat/benar), dan kreatif (mendapatkan jawaban dengan cara/pola baru). Di sisi lain, agar dipahami cara berbahasa yang baik dan benar, perlu didasari dengan memahami faktor pemerolehan bahasa.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Bahasa Ibu dan Bahasa Daerah

Keberagaman bahasa etnis di Indonesia yang terbagi atas rumpun Austronesia dan non-Austronesia terancam punah karena rumpun non-Austronesia di wilayah Indonesia bagian timur ditinggalkan oleh penuturnya karena urbanisasi dan perkawinan antaretnis. Menurut Kapuslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Abdul Rachman Patji, karena jarang digunakan, pada akhir abad ke-21 diperkirakan hanya sekitar 10 persen bahasa etnis yang bisa bertahan, terdapat 169 bahasa etnis yang terancam punah (*Kompas*, 16 Desember 2011). Diperkirakan 90 persen dari 6.500 bahasa di dunia akan hilang di akhir abad ke-20. Di Indonesia, diperkirakan hanya akan tersisa 75 bahasa dari 746 bahasa yang bertahan di akhir abad ke-20. Penyebabnya adalah situasi perang, bencana alam, urbanisasi, dan kawin campur. Data tahun 1990, hanya 15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang berbahasa ibu bahasa Indonesia (*Kompas*, 20 Agustus 2011). Berbeda dengan punahnya bahasa di Amerika Selatan dikarenakan penjajahan dan kondisi geografis benua. Amerika Selatan memiliki lebih dari 30 rumpun bahasa, bila dibandingkan dengan gabungan rumpun bahasa di Afrika, Asia, dan Eropa hanya 21 rumpun (*Kompas*, 2 Januari 2011).

Potensi Nusantara jika tidak dirawat, nasibnya akan tragis, sebagaimana kepemilikan bahasa daerah yang sedikitnya 10 bahasa daerah di Papua dan Maluku Utara ditengarai punah dan 32 lainnya

terancam punah. Hasil penelitian Frans Rumbrawer tahun 1999, 9 bahasa di Papua sudah punah yakni bahasa Bapu, Darbe, dan Wares di Kabupaten Sarmi, bahasa Taworta dan Waritai di Kabupaten Jayapura, bahasa Murkim dan Walak di Kabupaten Jayawijaya, bahasa Meoswar di Kabupaten Manokwari, bahasa Loegenyem di Kabupaten Raja Ampat, dan bahasa Ibu di Maluku Utara. Bahkan 32 bahasa daerah terancam punah karena jumlah penuturnya tersisa 2 hingga 100 orang yakni bahasa Bonerif, Foya/Foja, Itik, Liki, Mander, Marengi, Masep (Potafa), Pawi, dan Yoki di Kabupaten Sarmi, sedangkan bahasa Usku, Narau, Kapori, Tafanma, Dabra, dan Kwerisa di Kabupaten Jayapura. Bahasa Kofei, Sauri, Awera, Burate, Tafaro, Worja, dan Saponi di Kabupaten Waropeng. Bahasa Pyu, Kosare, dan Kembra di Kabupaten Jayawijaya. Barbara F. Grimes (1988) menyebutkan terdapat 672 bahasa daerah di seluruh Nusantara, tersebar di Papua 249 bahasa, di Maluku 134 bahasa, di Sulawesi 105 bahasa, di Kalimantan 77 bahasa, di Nusa Tenggara 54 bahasa, di Sumatera 38 bahasa, di Jawa dan Bali 15 bahasa. Hasil penelitian Pusat Bahasa sejak 1991 s.d 2008, baru memetakan 442 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah punah, menurut Dendy Sugono karena jumlah penuturnya berkurang hingga kurang dari 100 orang (dikategorikan terancam punah) atau habis (punah). Kunci memertahankan bahasa daerah berada di tangan penutur bahasa daerah dan pemerintah daerah dengan mengajarkan bahasa daerah kepada anak sebagai bahasa ibu (bahasa yang pertama kali dipelajari) sebelum bahasa nasional dan bahasa asing (*Kompas*, 26 Juli 2011).

Hasil riset Nazarudin, peneliti dari Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, bahasa daerah masyarakat adat yang tinggal/berdomisili di perbatasan Negara tergerus, penuturnya hanya berkisar 500 orang sebagaimana di perbatasan Timor Leste dan Papua. Di Pulau Kisar, Kecamatan Wonreli, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku yang berbatasan dengan Timor Leste, anak Suku Oirata kesulitan menggunakan bahasa daerah. Hal ini didukung oleh media yang tidak mengenalkan bahasa daerah dan penutur bahasa daerah yang masih ada tidak mempunyai keterampilan menulis yang baik. Akibatnya upaya mendokumentasikan bahasa daerah sebagai upaya pelestarian

budaya semakin sulit. Dari 749 bahasa yang ada di Indonesia, hanya sekitar 5 persen yang mempunyai aksara. Mereka tidak mempunyai dokumentasi sehingga sulit diajarkan kepada generasi penerus (*Kompas*, 13 Agustus 2015).

Keberagaman bahasa etnis di Indonesia yang terbagi atas rumpun Austronesia dan non-Austronesia terancam punah karena rumpun non-Austronesia di wilayah Indonesia bagian timur ditinggalkan oleh penuturnya karena urbanisasi dan perkawinan antaretnis. Menurut Kapuslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Abdul Rachman Patji, karena jarang digunakan, pada akhir abad ke-21 diperkirakan hanya sekitar 10 persen bahasa etnis yang bisa bertahan, terdapat 169 bahasa etnis yang terancam punah (*Kompas*, 16 Desember 2011).

Diperkirakan 90 persen dari 6.500 bahasa di dunia akan hilang di akhir abad ke-20. Di Indonesia, diperkirakan hanya akan tersisa 75 bahasa dari 746 bahasa yang bertahan di akhir abad ke-20. Penyebabnya adalah situasi perang, bencana alam, urbanisasi, dan kawin campur. Data tahun 1990, hanya 15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang berbahasa ibu bahasa Indonesia (*Kompas*, 20 Agustus 2011). Berbeda dengan punahnya bahasa di Amerika Selatan dikarenakan penjajahan dan kondisi geografis benua. Amerika Selatan memiliki lebih dari 30 rumpun bahasa, bila dibandingkan dengan gabungan rumpun bahasa di Afrika, Asia, dan Eropa hanya 21 rumpun (*Kompas*, 2 Januari 2011).

Analisis Unesco, diperkirakan 2.500 bahasa di dunia terancam punah, dari 6.000 bahasa dunia yang masih aktif dipakai pengguna bahasa. Diprediksi, pada akhir abad 21, bahasa daerah di dunia diperkirakan tersisa 10 persen. Agar bahasa tidak punah, solusi yang dilakukan Unesco dengan membuat atlas bahasa dunia dan menjadikan tanggal 21 Februari sebagai hari bahasa ibu internasional (*International Mother Language Day*). Sejarah penetapan bahasa ibu diabadikan dalam bentuk monumen di Bangladesh yang dikenal dengan monumen martir atau *Shaheed Minar* yang bertempat di kampus Universitas Dhaka, sebagai bentuk mengenang pengorbanan bahasa Bangla pada tanggal 21 Februari 1952 (Rahardi, 2009). Dengan demikian, untuk meredam punahnya bahasa sekaligus mengingatkan langkah pemerintah melalui

Pusat Bahasa yang berada di bawah naungan Kemendikbud agar mengayomi dan menghidupkan bahasa dengan berbagai langkah ideal, seiring peradaban dunia.

Keperhatian tersebut diwacanakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bahwa ada 15 bahasa daerah di Indonesia terancam ditinggalkan penuturnya sehingga perlu solusi hukum berupa RUU Perlindungan Bahasa dan Kesenian Daerah. Di Sulawesi Utara terdapat 14 bahasa daerah yang terancam punah, sebagaimana penutur bahasa Ponosakan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Juni 2015 tersisa 20 orang, yang sebagian telah berusia 60 tahun. Bahasa lima etnis Minahasa juga terancam karena masyarakat lebih cenderung bertutur dengan bahasa Melayu Manado. Data Unesco, Indonesia memiliki 640 bahasa daerah, 139 bahasa daerah terancam punah, 154-nya harus diperhatikan, dan 15-nya telah punah. Bahasa daerah yang terancam punah berada di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua Barat, Kepulauan Halmahera, Bima, dan Flores (*Kompas*, 18 Juni 2015). Orang yang berbahasa ibu disebut penutur asli, *native speaker* yakni yang lahir di sebuah negara, menguasai bahasa negara tersebut sejak anak-anak secara alamiah dan menggunakannya sebagai bahasa pertama. Bahasa ibu (*mother longue/mother language*) merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Tanggal 21 Februari ditetapkan sebagai Bahasa Ibu sejak 17 November 1999.

Adapun bahasa daerah adalah bahasa yang lazim dipakai di suatu daerah atau bahasa suku-bangsa. UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada Pasal 1 (6) bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 42 (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. (2)

Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Pelestarian Bahasa Daerah

Ada hal yang perlu didiskusikan atas pernyataan Mendiknas pada tahun 2011 bahwa masih tersisa 746 bahasa daerah di Indonesia. Bahkan diprediksi akhir abad ke-21 hanya 75 bahasa daerah yang bertahan. Bila prediksi itu benar-benar terjadi, kondisi bahasa daerah semakin merana, mengapa? Pertama, bahasa daerah digero-goti oleh bahasa nasional dan tidak dianggap bahasa ideal di rumah/keluarga. Ragam bahasa, etnis, dan tebaran pulau tersebut masing-masing memiliki keunikan sebagai wujud dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang utuh. Potensi tersebut perlu *diuri-uri* supaya eksis agar prinsip *the fittest would survive* (individu inferior akan mati dan individu superior akan bertahan) tidak menerpa khazanah budaya kita. Langkah riil yang kita lakukan adalah menghidupkan keanekaragaman etnis, budaya, dan khazanah lokal. Jika tidak, yang terjadi adalah konflik. Kedua, faktor penyebab punahnya ahasa daerah tidak mendapatkan perhatian untuk dilakukan aksi riil. Berdasarkan riset ahli bahasa dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fanny Henry Tondo menyatakan pada Selasa 24 Maret 2015 bahwa sebagian bahasa daerah di Nusantara semakin terancam punah, terutama akibat minimnya tradisi pengajaran bahasa daerah yang lintas generasi. Kondisi ini merugikan bangsa Indonesia karena keanekaragaman bahasa, sebagai salah satu unsur penting pembentukan kebudayaan, menjadi semakin berkurang. Idealnya, bahasa daerah dan bahasa nasional saling melengkapi. Namun, di Indonesia, bahasa daerah semakin terkikis karena dianggap tidak sebergengsi bahasa nasional. Indonesia memiliki jumlah bahasa daerah nomor dua terbanyak di dunia, yaitu 749 bahasa. Adapun Papua Niugini merupakan Negara berbahasa daerah terbanyak, yakni 800 bahasa. Pada periode 2011-2014,

LIPI meneliti enam bahasa daerah Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur, yaitu bahasa Gamkonora, Kao, Pagu, Oirata, Kafoa, dan Kui. Penelitian tersebut menemukan, jumlah penutur bahasa tersebut tidak lebih dari 1000 orang per bahasa. Bahkan, bahasa Kao hanya memiliki 10 penutur dan berusia di atas 50 tahun. Tondo menyatakan, sebuah bahasa bisa punah antara lain karena (1) dari dulu jumlah penuturnya terbatas, sementara jumlah keturunannya tidak bertambah. Akibatnya, bahasa mereka semakin tenggelam di antara bahasa mayoritas, (2) jumlah penutur berkurang drastis pada suatu masa akibat terjadi bencana alam atau wabah penyakit yang menewaskan banyak warga, (3) penduduk memilih untuk hidup berpindah tempat tinggal (nomaden) sehingga menyerap bahasa daerah baru. Hal yang perlu dipahami, warga setempat memilih berbincang dengan menggunakan bahasa Melayu lokal, seperti Melayu Ternate, Kupang, dan Alor. Mereka tak memiliki dokumen bahasa karena mayoritas bahasa di Indonesia tidak memiliki aksara. Rekomendasi LIPI, perlunya mendokumentasikan bahasa dalam bentuk kamus. Menurut antropolog dan peneliti bahasa daerah LIPI, Abdul Rachman Patji, faktor penghambat perkembangan bahasa daerah berupa (1) proses transfer bahasa antargenerasi yang tak maksimal. Umumnya, bahasa daerah oleh kedua orangtua untuk bercakap-cakap dan menggunakan bahasa Melayu ketika berbicara dengan anak, (2) penutur meninggalkan kampung halamannya, yang biasanya di wilayah terpencil, untuk merantau ke kabupaten atau kota dan tinggal di sana sepanjang hidup, (3) perkawinan silang antarsuku bangsa mengakibatkan orangtua memilih menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan anak, (4) banyaknya bahasa daerah dalam suatu wilayah membuat pemda tak bisa memprioritaskan bahasa yang dipilih sebagai muatan local di sekolah (*Kompas*, 26 Maret 2015).

Pelestarian sebuah bahasa sangat ditentukan sejauhmana bahasa tersebut digunakan sebagai alat dan media komunikasi secara kontinyu, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini berlaku juga pada bahasa daerah. Bila bahasa daerah tidak dilestarikan, kekhawatiran berupa punahnya bahasa daerah bukan angan-angan. Indikator awal dapat dilihat kebanyakan generasi muda tidak mampu lagi dan malu menggunakannya sebagai

alat komunikasi. Punahnya bahasa dapat dilihat penggunaan bahasa oleh masyarakat Jawa. Semula adalah bahasa Sansekerta, lalu bahasa Kawi (Jawa Kuno), kemudian bahasa Jawa zaman pertengahan sebelum kemudian menjadi bahasa Jawa modern seperti sekarang ini. Meskipun untuk mengetahui batasan dan faktor tidak digunakannya bahasa tersebut memerlukan penelitian secara kontinyu dan intens. Di antara hasil penelitian tentang perubahan bahasa dari aspek sejarah, dapat dilihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahsun (1995) tentang *Dialektologi Diakronis*. Penelitian itu mengungkap ihwal seluk-beluk suatu dialek berupa pemerian (deskripsi) dan kajian yang bersifat historis (diakronis). Menurut pengakuan Kepala Pusat Bahasa, Dendy Sugono saat itu, bahwa jumlah ilmuwan yang khusus meneliti bahasa Indonesia masih sangat terbatas, lulusan strata satu dan dua yang melakukan penelitian bahasa Indonesia sebagian besar belum berkategori ilmuwan peneliti serius, bahkan Pusat Bahasa baru memiliki sekitar 200 orang peneliti di bidang kebahasaan dan sastra yang jabatannya sebagai peneliti (*Media Indonesia*, 4 September 2006).

2. Penggerus Bahasa Daerah

Kemajuan bahasa telah dicapai bangsa Indonesia yang ditunjukkan dengan banyaknya pelajaran bahasa asing yang diajarkan dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Namun tanpa disadari, kemajuan itu secara perlahan mengikis keberadaan bahasa daerah yang menjadi bagian dari bahasa nasional dan kekayaan budaya nasional. Ironisnya lagi, banyak kaum muda yang malu berbahasa daerah karena merasa ketinggalan zaman. Hal ini sebagai gejala serius yang mengancam eksistensi bahasa daerah. Solusinya adalah adanya lembaga yang mengapresiasi karya sastra dan seni daerah sebagai bagian dari pemberdayaan bahasa daerah. Hal ini dinyatakan oleh Guru Besar Linguistik Universitas Udayana. Di sisi lain, bahasa daerah dapat berperan sebagai cara untuk mengurangi buta huruf bagi masyarakat di daerah terpencil-tertinggal, pedesaan, daerah adat dengan cara memberikan layanan keaksaraan dengan bahasa daerah (bahasa ibu) sebagai bahasa pengantar. Hal ini

telah dilaksanakan oleh Depdiknas bekerja sama dengan UNESCO, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco, Arief Rahman, ternyata terbukti, karena bahasa daerah tidak terjadi hambatan kultural dan bentuk melestarikan bahasa daerah itu sendiri". Hal serupa terbukti pula ketika masyarakat terpencil di Desa Cibago (Unud), Bali, Aron Meko Mbeté dalam seminar linguistik yang diadakan di Unnes, Semarang (*Kompas*, 9 September 2006).

Pernyataan tersebut kontras dengan pernyataan Redyanto Noor, terdapat paradigma klasik sesungguhnya telah basi yang mengungkapkan bahwa kemerosotan akhlak, tipisnya budi pekerti, terutama yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku interaksi-komunikasi orang Jawa generasi sekarang. Salah satu sebabnya adalah pemakaian bahasa Jawa yang tidak baik dan tidak benar. Dalam asumsi terdapat aksioma yang mempercayai bahwa pemakaian bahasa Jawa secara baik dan benar akan menata sikap dan perilaku dalam wujud *unggah-ungguh* yang *bener* yang *njawani*. Asumsi itu tak lagi relevan untuk zaman sekarang, sebab semua orang tahu bahwa bahasa Jawa telah memaksa penuturnya mengejawantahkan dalam wujud sikap dan perilaku sehari-hari. Celakanya, ukuran baik dan buruknya bahasa Jawa itu diidentikkan dengan ragam baku bahasa Jawa. Untuk menggunakan ragam baku bahasa Jawa, orang mesti bersusah payah menguasai sistem kode yang amat rumit dan *njlimet*: menyangkut persoalan kosakata, diksi, pemakaian kata atau istilah, kalimat, dan seterusnya. Padahal derivasi kata dan kalimat bahasa Jawa yang menyangkut padanan dan strukturnya dalam strata itu jumlahnya luar biasa banyak, yang tidak mungkin dapat dikuasai tanpa pembelajaran secara ekstra (*Suara Merdeka*, 3 September 2006).

Keberadaan bahasa daerah (Jawa) berkembang dan diwariskan oleh masyarakat Republik Suriname, mereka pengguna bahasa Jawa dengan jumlah penutur mencapai 500 ribu orang, bahkan saat diadakannya kongres bahasa Jawa (KBJ) IV di Semarang pada 11 s.d 14 September 2006, mereka hadir disertai Ketua Parlemen Suriname, Paul Salam Soemohardjo dan peserta pendamping lainnya, Tatap Prawirodinomo dan Suparmin Sunjoyo. Demikian pula bahasa daerah lainnya memiliki nilai yang tinggi, sebagaimana keberadaan bahasa

Banyumasan memiliki karakter dan corak bersahaja, sederhana, egaliter, dan nyaris tidak mengenal pelapisan. Meskipun kaum muda Banyumas meninggalkan bahasa Banyumasan karena (masih) ter (di) belenggu dan muncul rasa rendah diri bila dihadapkan dengan orang wetan (Yogya-Solo). Perasaan rendah diri tersebut boleh jadi karena terbawa pola pemetaan yang dilakukan oleh Koentjaraningrat (dalam karyanya: Kebudayaan Jawa) yang membagi kebudayaan menjadi (a) kebudayaan *nagari agung* (Solo-Yogya), (b) *peisir wetan* (meliputi utara pulau Jawa sebelah timur, mulai dari Semarang hingga Surabaya), (c) *peisir kilen* (meliputi pantura pulau Jawa sebelah barat, mulai dari Semarang hingga Brebes), (d) *mancanagari*, meliputi Madiun, Kediri, dan daerah aliran Sungai Brantas, (e) *bagelen*, berada di wilayah eks-karisidenan Kedu, Purworejo, Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan sebagian Kebumen bagian Timur, (f) *banyumasan*, meliputi eks-karisidenan Banyumas-Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan sebagian Kebumen Barat, dan (g) *tanah sabrang* meliputi pantai timur pulau Jawa, wilayah Banyumas, dan sekitarnya. Kesadaran akan hal ini oleh pemerintah telah ditindaklanjuti dengan dinyatakannya dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 33 ayat (2) bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan.

Kesadaran besarnya manfaat bahasa daerah dalam *nguri-uri* budaya daerah (Jawa) diawali ketika kongres bahasa Jawa III pada tanggal 15 s.d 21 Juli 2001 di Yogyakarta, dalam kongres tersebut merekomendasikan agar bahasa Jawa diajarkan di sekolah mulai dari jenjang SD hingga SLTA di wilayah DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Meskipun ide masuknya bahasa Jawa dalam kurikulum dipandang (terdapat) langkah yang lebih penting, menurut Redyanto Noor (Dosen Fakultas Sastra Undip, Semarang), yakni kajian bahasa Jawa yang dibutuhkan sekarang ini bukan soal takrif dan fungsi sosial-kulturalnya

sebagai pemelihara peradaban, dan selalu mengagungkan nilai-nilai. Rekomendasi tersebut direspon oleh Gubernur Jawa Tengah, Mardiyanto, dengan diterbitkannya surat keputusan Nomor 895.5/01/2005 yang menetapkan kurikulum mata pelajaran bahasa Jawa pada jenjang SD/MI hingga SMA/MA/SMK/MAK. Secara geografis persebaran bahasa Jawa bervariasi secara kedaerahan yakni dialek Yogya-Solo, dialek banyumasan, dialek Tegal, dan dialek Jawa timuran (Surabaya-Malang). Dalam realisasinya agar tidak terjadi konflik, pengajaran bahasa Jawa disesuaikan dengan daerah masing-masing dengan pertimbangan pembelajaran bahasa Jawa harus komunikatif dan dapat dijadikan media komunikasi dalam masyarakat masing-masing.

Kepedulian masyarakat pengguna bahasa dalam menggunakan bahasa sebagai media interaksi lisan dan tulis sangat berperan dalam meneguhkan eksistensi bahasa, baik bahasa lokal, nasional, maupun internasional. Keberadaan bahasa lokal pada tataran realitas menghadapi problem di antaranya desakan penggunaan bahasa nasional dan internasional dalam berinteraksi. Ada aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerhati dan peminat bahasa Indonesia kaitannya dengan pengakuan kepemilikan bahasa. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mahsun. Hal itu dinyatakan Mahsun ketika memberikan kuliah umum dan pembekalan kepada perwira tinggi di Universitas Pertahanan Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Jumat 8 Agustus 2014. Sedikitnya 62.000 kata bahasa Indonesia diklaim oleh Brunai Darussalam sebagai bahasa Melayu dalam upaya mendorong bahasa Melayu sebagai bahasa internasional. Banyaknya kata tersebut diambil secara utuh dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan dimasukkan ke dalam *Kamus Bahasa Melayu Nusantara* yang diterbitkan Brunai sejak 2003. Hanya ada 400 kata yang murni bahasa Melayu dalam *Kamus Bahasa Melayu Nusantara* tersebut dan sisanya murni bahasa Indonesia. Badan Bahasa menuntut agar dicantumkan nama badan bahasa dalam produk *Kamus Bahasa Melayu Nusantara* karena pengakuan itu pun tidak ada. Brunai menjanjikan akan menambahkan satu halaman pada edisi berikutnya. Menurut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur dan

Perlindungan Bahasa Sugiyono, jika tidak ada pengakuan, itu sama dengan plagiat. Dahulu pernah dituntut, tetapi belum berhasil karena banyak pejabat Brunei yang sudah diganti. Untuk mengantisipasi kasus serupa maka dibangun 49 pusat kajian bahasa Indonesia di sejumlah negara guna menambah sebaran jumlah penuturnya dan mendorong agar bahasa Indonesia boleh digunakan di forum internasional (*Kompas*, 9 Agustus 2014). Bahasa juga berperan sebagai media keberlangsungan bisnis pariwisata. Indonesia merupakan pasar potensial untuk industri pariwisata Thailand. Penguasaan bahasa Indonesia menjadi cara agar wisatawan merasa nyaman dengan tersedianya pemandu bahasa Indonesia di Thailand. Pada tahun 2013, tercatat 630.000 orang Indonesia berkunjung ke Thailand, sebagian besar berwisata, belanja, dan kuliner (*Kompas*, 13 September 2014).

Begitu pula bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia yang mengalami problem serupa yakni terdesak oleh penggunaan bahasa internasional. Untuk mengantisipasi meredupnya bahasa nasional, pemerintah harus melaksanakan amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 37 (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Perguruan Tinggi.

3. Upaya Memertahankan Bahasa Daerah

Bahasa Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahasa Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pasal 1 (6) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, upaya memertahankan bahasa daerah dilakukan dengan:

a. Pengenalan Bahasa Daerah pada Anak

Untuk mengantisipasi menurunnya peran bahasa daerah, sangat memerlukan peran pimpinan daerah. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bahasa, Budaya, dan Aksara Jawa. Di dalamnya tercantum ketentuan yang memuat penggunaan Bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan. Pemprov mewajibkan mengalokasikan satu hari dalam seminggu untuk menerapkan penggunaan Bahasa Jawa bagi seluruh pegawai. Perda juga mengatur tentang Pendidikan Bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib selama dua jam pelajaran di sekolah SD, SMP, dan SMA. Perda mengamanatkan agar seluruh masyarakat Jawa Tengah memakai bahasa Jawa sebagai media komunikasi sehari-hari. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 yang mengubah Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2013. Pergub lama hanya mengatur penggunaan bahasa Jawa pada kutbah keagamaan, rapat-rapat RT/RW, lembaga-lembaga adat, dan organisasi kemasyarakatan. Tetapi, Pergub 55 yang ditetapkan pada 22 Agustus 2014 mewajibkan penggunaan bahasa Jawa di lingkungan kerja instansi lain, baik situasi maupun nonformal sekali dalam seminggu pada hari Kamis. Bahasa Jawa yang dimaksud kromo atau ngoko dengan mempertimbangkan dialek daerah masing-masing. Pelaksanaan Pergub harus dievaluasi kinerjanya oleh pemda Jateng.

Bupati Kudus sejak Selasa 25 Maret 2014 mencanangkan hari berbahasa Jawa untuk Kabupaten Kudus. Tujuannya untuk membangkitkan semangat dalam mengembangkan bahasa Jawa di Kudus dan pengembangan karakter warga Kudus. Bahasa Jawa dipandang memiliki muatan budaya seperti sopan-santun (tatakrama), mawas diri, menghormati dan menghargai orang lain terutama yang lebih tua. Di sisi lain, kian memudarnya penggunaan bahasa Jawa di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Penggunaan sehari berbahasa Jawa setiap hari Rabu tersebut di kantor pemerintah dan sekolahan di wilayah Kabupaten Kudus. Dalam pembelajaran, materi pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa asing tidak menggunakan bahasa Jawa.

Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes terdapat 18 desa, warga Desa Pangebatan menggunakan dua bahasa, yakni Jawa dan Sunda. Pangebatan berada paling timur dari Kecamatan Bantarkawung yang berbatasan dengan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Sekitar 15.000 warga Desa Pangebatan tersebar di 12 dukuh yang menggunakan dwibahasa daerah (Jawa dan Sunda). Bahasa Sunda sebagai bahasa ibu, meski komunikasi sehari-hari dengan bahasa Jawa diawali karena banyaknya warga pendatang yang berbahasa Jawa. Pada acara resmi pemerintahan menggunakan bahasa nasional. Pada acara perkawinan, ada yang menggunakan adat Jawa atau Sunda. Budaya seni yang eksis berupa rudad, kentongan, calung, dan jaipong. Dalam muatan lokal pembelajaran bahasa di sekolah menggunakan materi bahasa Jawa. Masuknya bahasa Sunda di Desa Pangebatan sejak era Kerajaan Siliwangi (*suaramerdeka.com* 21 April 2015).

Memertahankan bahasa daerah tersebut berpijak pada UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 33 ayat (2) bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan.

b. Lembaga Pendidikan sebagai Pelestari Bahasa

Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi harian dan dijadikan materi ajar di kelas, tentunya memiliki beberapa manfaat, di antaranya memunculkan emosi kedaerahan (dalam arti luas dan positif), keakraban, dan memelihara keberadaan bahasa daerah itu sendiri. Realitas pembelajaran bahasa daerah, dimunculkan catatan oleh Teguh Supriyanto, bahwa pembelajaran bahasa daerah yang ditonjolkan adalah (a) bagaimana menciptakan rasa suka peserta didik terhadap bahasa daerah, (b) dalam materi ajar mengedepankan struktur kalimat, (c) materi ajar dalam berkomunikasi kedaerahan disesuaikan dengan eksklusivitas kepriyaiannya atau merumuskan dan menawarkan metode pengajaran bahasa jawa untuk dipaksakan masuk kurikulum pendidikan formal. Semua itu tidak ada gunanya, selain membebani

institusi pendidikan, terutama guru dan anak didik, yang lebih penting adalah strategi memodifikasi (baca: memperkaya) bahasa Jawa dengan mendekonstruksi sistem kodenya menjadi lebih egaliter, moderat, sederhana, dan berterima (*Suara Merdeka*, 3 September 2006). Menurut Pranowo (2006) mewacanakan, peserta didik jenjang TK hingga SD menggunakan bahasa *ngoko alus* dialek daerah, dan pada kelas V-VI diberikan suplemen berupa menulis karangan dengan menggunakan ragam *ngoko alus* dialek kedaerahan. Pada jenjang SLTP menggunakan bahasa ragam *kromo* dan menulis bahasa Jawa dengan menekankan aspek kognitif. Untuk jenjang SLTA menggunakan bahasa ragam *kromo* dan mengarang dengan kompetensi kemampuan dan keterampilan siswa berbicara dan menulis menggunakan bahasa Jawa ragam *kromo*. Namun dalam realitasnya, penggunaan bahasa daerah sebagai materi ajar dalam proses pembelajaran menyisakan permasalahan berupa: jumlah guru yang terbatas, buku teks yang belum pasti untuk dijadikan pegangan, kondisi siswa yang tidak seluruhnya 'orang asli Jawa', minimnya jam pelajaran, dan kondisi masyarakat yang *lieterogen* (serba tidak sama).

D. Simpulan

UU Nomor 24 Tahun 2009 yang disahkan pada tanggal 9 Juli 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dapat dijadikan sandaran hukum. Pasal 65 Warga Negara Indonesia berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang ini. Upaya memertahankan bahasa daerah sangat tergantung menumbuhkan kesadaran warga melestarikan bahasa daerah, kebijakan pemerintah daerah berupa produk hokum yang pelaksanaannya tegas, dan pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah sejak di dunia pendidikan dari jenjang dasar hingga di perguruan tinggi dengan kualitas tinggi dan konsisten. Bila ketiga bentuk upaya tersebut tidak optimal, yang terjadi adalah makin terpuruknya keberadaan bahasa daerah. Keterpurukan itu bagian awal dari rapuhnya bahasa

daerah yang akan lenyap di muka bumi ini.

Sebelum tragedi punahnya bahasa daerah di berbagai wilayah negeri ini terjadi dan memilukan sebagaimana yang diderita bahasa daerah lainnya, perlu diantisipasi sedari dini. Kecintaan terhadap bahasa daerah merupakan bagian dari upaya melestarikan bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

Ensiklopedi Nasional Indonesia. 2004. Jilid III.

Pranowo. *Pembelajaran Bahasa Jawa*, Kompas, 20 April 2006.

Rahardi, R. Kunjana. *Selamatkan Bahasa Jawa!*. Kompas, 21 Februari. 2009.